



KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR: 400/Kep.KDH/A/2012

TENTANG

AGENDA RISET DAERAH TAHUN 2011-2015

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ilmu, pengetahuan dan teknologi dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, yang disusun dalam suatu kebijakan strategis pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam perencanaan kegiatan penelitian, pengembangan, rekayasa, dan penerapan ilmu, pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan dukungan ilmu, pengetahuan dan teknologi di wilayah Kabupaten Sleman

perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Agenda Riset Daerah Tahun 2011-2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
 5. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2010-2014;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Agenda Riset Daerah tahun 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agenda Riset Daerah tahun 2011-2015 merupakan dokumen yang memberikan arah bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi, lembaga penelitian dan pengembangan, pebisnis dan masyarakat di Kabupaten Sleman untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

Cap / ttd

SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
4. Kepala SKPD Kabupaten Sleman.
5. Anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Sleman.
6. Rektor/Ketua-Ketua LPM/LPPM/LP3M/DPPM/
Lemlit Perguruan Tinggi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 400/Kep.KDH/A/2012

TANGGAL : 7 Desember 2012

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2011 – 2015 dilaksanakan berdasarkan pada Visi Kabupaten, yakni terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015. Untuk dapat mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing dan berkeadilan gender maka kebijakan, program dan pelayanan publik di Kabupaten Sleman pro-kesejahteraan, *pro-poor*, pro-keadilan dan *pro-gender*. Dicegah adanya kebijakan yang merugikan kepentingan penduduk miskin, merugikan kepentingan perempuan, mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pekerjaan, pelayanan publik dan keterlibatan dalam proses politik.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (ilmu pengetahuan dan teknologi) merupakan unsur utama dalam kemajuan peradaban manusia. Secara umum peranan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk:

- a. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan daya saing bangsa;

- c. memperkuat kesatuan dan persatuan nasional;
- d. mewujudkan pemerintahan yang transparan; dan
- e. meningkatkan jatidiri bangsa di tingkat internasional.

Selain itu melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan alam untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan juga harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Agenda Riset Daerah (ARD) ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut.

1.2. Kerangka Kerja Legal ARD

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)

Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 amandemen ke-4 menyebutkan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bertujuan untuk memperkuat daya dukung Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mempercepat pencapaian tujuan Negara

3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengamanatkan untuk pengkoordinasian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam koordinasi antar instansi terkait.

4. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2010-2014, yang berisi arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025 Tahun 2006 memberikan landasan akademik terhadap 6 (enam) bidang fokus pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi berisi roadmap masing-masing bidang yang meliputi:
 - 1) pembangunan ketahanan pangan;
 - 2) penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan;
 - 3) pengembangan teknologi dan manajemen transportasi;
 - 4) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) pengembangan teknologi pertahanan keamanan;
 - 6) pengembangan teknologi kesehatan dan obat.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.

1.3. Tujuan Penyusunan ARD

1. Menjawab permasalahan pembangunan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Memberikan arah bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi, pebisnis dan masyarakat bagi Kabupaten Sleman.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

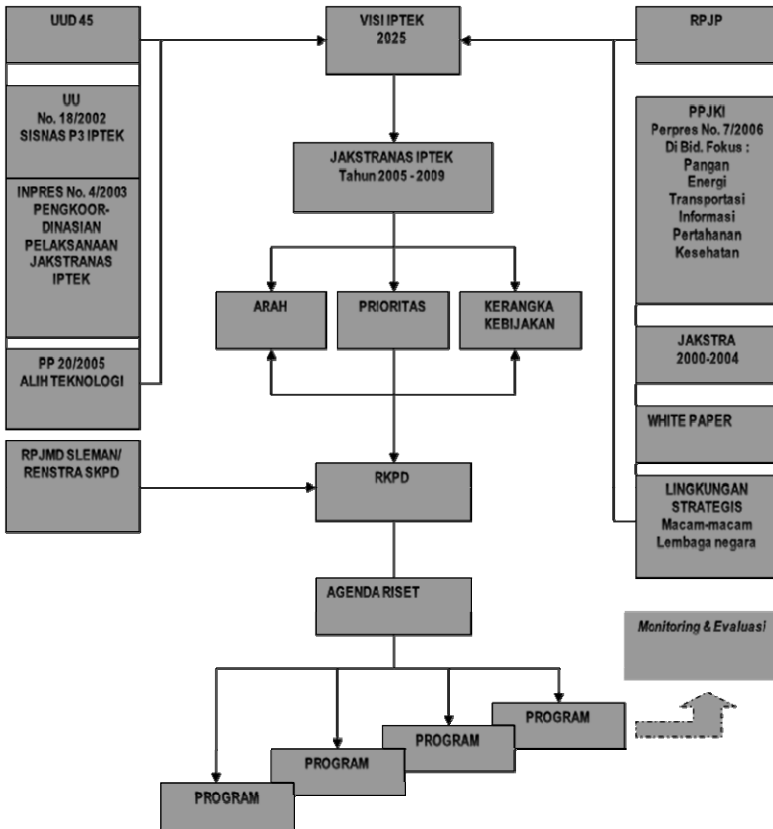
Bangsa Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang kokoh bagi pembangunan nasional di bidang IPTEK, yakni Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945 (Amandemen ke-4) yang menyatakan bahwa "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia". Kemudian, pada tahun 2002 telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK. Tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tersebut adalah:

"Untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan Negara serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan Negara dalam pergaulan internasional".

Pasal 18 dan 19 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan Pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan ke dalam bentuk kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan

teknologi (Jakstranas Iptek). Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tersebut, menjadi dasar dibentuknya kelembagaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Sleman. Implikasinya diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 66/Kep.KDH/A/2010 tentang Dewan Riset Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 207/Kep.KDH/A/2011 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 66/Kep.KDH/A/2010 tentang Dewan Riset Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut, tugas DRD Kabupaten Sleman 2010-2013 difokuskan pada dua:1) mendukung pemerintah daerah dalam perumusan arah, prioritas, serta kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 2) memberikan masukan dan pandangan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan strategis di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk itu, DRD Kabupaten Sleman perlu merumuskan kebijakan riset yang diantaranya dituangkan dalam ARD. Kerangka kerja legal-formal dan strategis yang dirujuk dalam penyusunan dokumen ARD diperlihatkan pada gambar berikut:



Gambar Kerangka Kerja Legal-Formal dan Lingkungan Strategis Rujukan dalam Penyusunan Agenda Riset Daerah

BAB III
FOKUS AREA PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Mengacu pada tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2011–2015, dan Kebijakan Strategis Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2005–2009 maka bidang-bidang fokus penelitian pada Agenda Riset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011–2015 terdiri atas enam bidang fokus:

- (1) Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (2) Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
- (3) Lingkungan dan Kebencanaan;
- (4) Kesehatan dan Obat;
- (5) Keamanan dan Ketertiban;
- (6) Sosial Kemasyarakatan.

3.1. Bidang Fokus Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah penduduk pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.125.369 jiwa. Sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Sleman terbesar bergerak di sektor pertanian, yakni sebanyak 28,6% atau 321.856 jiwa.

Program dan kegiatan urusan pertanian pada tahun 2011 mampu mendukung produksi tanaman pangan berupa padi sawah dan ladang sebanyak 232.713 ton untuk pemenuhan kebutuhan beras di Kabupaten Sleman dan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara produksi beberapa

tanaman pangan lainnya mengalami penurunan karena terjadinya fenomena perubahan iklim yang ekstrim (curah hujan sangat tinggi) dan serangan organisme pengganggu tanaman yang semakin meningkat.

Komoditas perkebunan yang mengalami peningkatan produksi yang berarti adalah tembakau rakyat sebesar 65,17% dan tembakau Virginia sebesar 714,28% karena kemarau yang panjang, sehingga tembakau mengalami pertumbuhan yang optimal.

Jumlah populasi ternak secara umum mengalami peningkatan, sedangkan produksi telur, susu dan daging pada tahun 2011 mengalami sedikit penurunan karena belum pulihnya populasi ternak di wilayah sentra produksi susu dan telur (Cangkringan dan Pakem) akibat erupsi Merapi pada tahun 2010.

Isu strategis pada urusan pertanian adalah masih cukup tingginya alih fungsi lahan, biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, belum optimalnya manajemen agribisnis, dan akses pemodalannya yang belum merata. Isu strategis pada urusan ketahanan pangan adalah belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya kecenderungan bergesernya pola konsumsi masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun. Selain itu di beberapa daerah di Kabupaten Sleman juga rawan terhadap bencana alam, khususnya dari erupsi Gunung Merapi.

Permasalahan lainnya adalah masih banyaknya penggunaan bahan adiktif yang berpengaruh pada keamanan pangan.

3.2. Bidang Fokus Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Jaringan infrastruktur dan teknologi informasi yang meliputi sarana transportasi, jalan dan jembatan, air bersih, irigasi, dan komunikasi teknologi informasi merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan kualitas yang memadai peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah diwujudkan.

Lokasi Kabupaten Sleman pada posisi strategis, jalur Timur–Barat menuju Surabaya–Bandung–Jakarta. Jalur Utara–Selatan merupakan arah menuju Semarang–Yogyakarta. Selain posisi strategis kondisi infrastruktur jalan yang bagus memberikan kemudahan akses menuju daerah lain.

Erupsi Gunungapi Merapi tahun 2010 mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang merupakan dampak langsung dan tidak langsung terhadap sistem jaringan infrastruktur terutama di wilayah sekitar Gunungapi Merapi. Hal ini perlu diantisipasi dalam strategi pengembangan dan revitalisasi jaringan infrastruktur ke depan.

Sistem manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama guna mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting. Sistem transportasi pendukung bencana perlu ditingkatkan guna mengurangi dan melokalisir dampaknya.

Jumlah infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sleman meliputi jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan poros desa, jembatan dan gorong-gorong tergolong lebih banyak. Data tahun 2011, jalan negara 45,4 km, jalan provinsi 115,7 km, jalan kabupaten 1.085,1 km, jalan poros desa 2.046,5 km, jembatan yang sudah dibangun dan berfungsi mencapai 265 buah kondisi baik, 122 buah kondisi sedang, dan 57 buah kondisi rusak. Jumlah bendung 386 kondisi baik, 290 buah kondisi sedang, 36 buah kondisi sedang, 60 buah kondisi rusak. Sedangkan saluran/jaringan irigasi primer sepanjang 346.811 m dengan kondisi baik 247.000 m, kondisi sedang 94.367 m, kondisi rusak 5.444 m, saluran/jaringan irigasi sekunder sepanjang 421,4 m dengan kondisi baik 297.622 m, kondisi sedang 120.455 m, dan kondisi rusak 3.317 m. Luas daerah irigasi 24.635,90 ha yang terbagi menjadi 2.082 Daerah Irigasi.

Cakupan pelayanan air minum untuk daerah perkotaan baru mencapai 20%, sementara berdasarkan target MDG tahun 2015 harus mencapai 68%. Hal tersebut bukanlah

sesuatu yang mudah mengingat terbatasnya sumber air baku dan dana untuk perluasan jaringan.

Untuk memperlancar telekomunikasi antar wilayah di kabupaten Sleman telah didukung oleh jaringan telepon yang memadai untuk kawasan perkantoran dan keperluan pelayanan masyarakat. Secara bertahap sistem analog akan diganti dengan *Voice over Internet Protocol (VoIP)* dan *wireless*. *Wireless* disiapkan untuk sampai ke desa-desa pada tahun 2010, sedangkan telepon yang berbasis internet *VoIP* baru terpasang di 78 titik dan terintegrasi dengan *PABX*. Ketersediaan jaringan internet di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman tersebar di 75 lokasi terdiri 30 SKPD, 17 kecamatan, 12 puskesmas, 10 desa, BLK, 3 kompleks rumah dinas dan 6 lokasi di kawasan Gunungapi Merapi yang terhubung dengan lebih dari 650 unit komputer. Jaringan tersebut memiliki kecepatan transfer data mencapai 100 Mbps (baik trafik intranet maupun internet).

Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Isu strategis pada urusan komunikasi dan informatika

adalah belum optimalnya implementasi *e-government* dan pelayanan perijinan yang menggunakan teknologi informasi, sedangkan isu strategis pada urusan perhubungan adalah kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dalam memperkuat fungsi jaringannya, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Isu strategis pada urusan pekerjaan umum adalah tingkat kerusakan jalan dan upaya pemeliharannya, jembatan dan irigasi belum sebanding dengan kebutuhannya serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana.

3.3. Bidang Fokus Lingkungan dan Kebencanaan

Berdasar kondisi alam Kabupaten Sleman, dimana terdapat Gunungapi Merapi di sebelah utara dan patahan aktif sesar Opak di bagian tenggara menjadikan Kabupaten Sleman mempunyai potensi ancaman bencana baik bencana erupsi Merapi, banjir lahar dingin, maupun gempa bumi.

Adanya Gunungapi Merapi disamping mendatangkan bencana erupsi dan lahar dingin, juga merupakan reservoir air alami sehingga Kabupaten Sleman merupakan daerah resapan air bagi Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Sistem sungai di Kabupaten Sleman mempunyai pola radial-paralel yang terbagi dalam subsistem yaitu subsistem S. Progo dan subsistem S. Opak.

Pertumbuhan penduduk per tahun Kabupaten Sleman sebesar 0,73%. Pertumbuhan ini relatif tinggi, hal ini disebabkan fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Yogyakarta, daerah untuk melanjutkan pendidikan, dan daerah pengembangan permukiman/perumahan. Sehingga pertumbuhan penduduk yang terjadi lebih banyak didorong oleh faktor imigrasi penduduk bukan oleh tingkat kelahiran yang tinggi. Sebagai dampak dari tekanan jumlah penduduk yang meningkat maka selama 5 tahun terakhir luas lahan sawah turun rata-rata per tahun sebesar 0,11 % dan luas pekarangan turun 0,125 %.

Kondisi lingkungan di Kabupaten Sleman secara umum relatif baik. Kualitas udara ada beberapa parameter (COx dan debu) yang melebihi ambang batas pada daerah yang padat lalu lintas. Hasil pengambilan sampel air tanah di Kecamatan Depok, Mlati, Gamping, Ngaglik menunjukkan kandungan bakteri e.coli tinggi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih kurang terutama perusahaan-perusahaan dalam mengelola limbah belum optimal, IPAL belum sesuai dengan volume dan jenis limbah yang dihasilkan sehingga masih mencemari lingkungan. Limbah dari ternak sudah banyak yang dibuat biogas dan pupuk organik akan tetapi bau dari limbah ternak belum dapat diatasi.

Untuk konservasi air dan memperbesar tampungan air pemerintah Kabupaten Sleman ada Program Kali Bersih

(Prokasih), IPAL Komunal dan MCK Plus, biopori, pembangunan sumur peresapan air hujan (SPA) dan membangun embung. Untuk mengatasi pencemaran bakteri e.coli pada air tanah maka dilakukan pengendalian dengan memperluas kapling rumah yakni minimal luasan 125 M2 dan sanitasi di wilayah perkotaan di sebagian wilayah kecamatan Depok, Ngaglik dan Mlati telah dibangun Jaringan IPAL terpusat di Sewon Kabupaten Bantul dengan panjang jaringan induk sepanjang 10 Km dan saluran servis 7,1 km.

Sampah yang dikelola oleh pemerintah sekitar 16 % dari seluruh timbulan sampah yang ada, sisanya dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan sampah yang dikelola masyarakat sebagian sudah pengelolaan sampah mandiri dengan menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) karena Kabupaten Sleman merupakan daerah resapan air dan struktur tanah yang berpasir sehingga tidak mempunyai TPA sampah. Sampah yang tidak dapat dibuat kompos di buang di TPA Piyungan yang dikelola bersama dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dalam wadah Sekber Kartamantul.

Sumberdaya mineral/bahan galian di Kabupaten Sleman terdiri dari batu kapur, breksi batu apung, andesit, tanah liat, pasir dan kerikil. Potensi yang paling banyak yakni pasir dan kerikil yang dapat dikatakan sumberdaya terbarukan selama masih ada erupsi Merapi.

Sumberdaya hutan di Kabupaten Sleman menurut fungsinya terbagi menjadi Hutan Lindung, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam. Pada tahun 2007 semua kawasan fungsi hutan berubah menjadi Taman Nasional Gunungapi Merapi (TNGM) seluas 1.729,91 ha. Di samping TNGM masih terdapat Hutan Rakyat seluas 4.078,40 ha dan Hutan Kota seluas 1.83 ha yang terletak di Kecamatan Sleman.

Isu strategis pada urusan lingkungan dan kebencanaan yakni (1) terjadinya degradasi lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan dampak pemanasan global; (2) perlunya integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan paska bencana secara seimbang dan sinergis.

3.4. Bidang Fokus Kesehatan dan Obat

Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dan obat-obatan diarahkan untuk memberikan pemecahan berbagai permasalahan utama kesehatan yang dihadapi sebagian masyarakat Sleman. Prioritas utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dan obat-obatan adalah:

(a) pencapaian gizi seimbang, terutama untuk mempertahankan dan meningkatkan keadaan gizi masyarakat serta tumbuh kembang anak dalam rangka

menjaga kualitas SDM Indonesia;

(b) pengembangan obat bahan alam menjadi fitofarmaka dan sediaan obat modern;

(c) pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui deteksi dini dan diagnosis, peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan;

(d) penjagaan mutu pelayanan kesehatan dengan prioritas kesehatan keluarga, pengawasan penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, perawatan terhadap korban trauma dan bencana, serta pengurangan dampak pembangunan terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia.

Isu strategis pada masalah kesehatan adalah terbatasnya sumberdaya kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, dan masih banyaknya penduduk yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan.

3.5. Bidang Fokus Keamanan dan Ketertiban

Secara relatif, kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sleman relatif baik. Ratio jumlah Polisi Pamong Praja per 100.000 penduduk adalah 0,50 pada tahun 2010. Namun dengan lokasi wilayah Kabupaten Sleman yang bersifat terbuka dan menjadi lintasan dari dan ke berbagai

daerah lain, serta memiliki posisi strategis dengan keberadaan 39 Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta menyebabkan imigrasi penduduk masuk ke Sleman semakin meningkat dari tahun ke tahun sebanyak 0,14% yang sebagian besar menjadi mahasiswa. Meningkatnya jumlah penduduk ini tentu membawa persoalan tersendiri yang mengikutinya, khususnya terkait masalah keamanan dan ketertiban wilayah.

Di lain pihak kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan. Sebagai prasyarat utama, adalah adanya perhatian khusus dari semua pemangku kepentingan. Pemahaman terhadap aspek keamanan dan ketertiban perlu terus didorong agar masyarakat tidak lagi berposisi sebagai obyek, namun sebaliknya justru menjadi subyek. Pada keadaan demikian, keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Apalagi potensi munculnya gangguan dan keamanan di Kabupaten Sleman sebagai sebuah wilayah aglomerasi cukup besar.

Diperlukan langkah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan profesionalisme dan responsivitas aparat keamanan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban agar tetap kondusif. Peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dan menciptakan sistem komunikasi keamanan akan memberikan kontribusi besar dalam penciptaan stabilitas daerah.

Isu strategis pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi peraturan.

3.6. Bidang Fokus Sosial Kemasyarakatan

Bidang Fokus Sosial Kemasyarakatan meliputi pendidikan, sosial dan budaya. Termasuk dalam pengertian sosial dan budaya di sini adalah terbangunnya nilai-nilai toleransi, pluralisme dan multikulturalisme dalam masyarakat dan terjaganya hubungan yang damai antar kelompok-kelompok sosial yang berbeda dalam hal etnisitas, agama dan kepercayaan, dan dalam hal identitas dan orientasi seksual dan terbebasnya masyarakat dari kekerasan yang berbasis perbedaan identitas.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, yakni pendidikan dari masa kanak-kanak sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Wilayah Kabupaten Sleman memiliki 39 Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta dengan mahasiswa dari berbagai daerah dan dari berbagai negara menjadikan masyarakat Kabupaten Sleman memiliki multikultural yang tinggi. Selain itu Kabupaten Sleman memiliki beragam potensi budaya, baik berupa kawasan cagar budaya, benda cagar budaya, karya seni, kesenian dan sistem sosial yang ada di masyarakat. Akan tetapi di wilayah Sleman juga terdapat potensi masalah

keamanan sehubungan dengan munculnya komunitas eksklusif yang cenderung membentuk semacam *enclave*. Mereka hidup secara tertutup, cenderung mengambil jarak dengan lingkungan sekitar. Komunitas seperti ini berpotensi menciptakan konflik sosial, dan mematikan iklim pluralisme.

Perencanaan sosial masuk dalam perencanaan pembangunan secara keseluruhan, sosial menjadi mainstream pembangunan sosial. Pada dasarnya maksud pembangunan adalah memperbesar pilihan masyarakat. Masyarakat bisa memiliki parameter non pendapatan seperti akses ke pengetahuan, perdamaian dan keamanan, kesetaraan gender, waktu santai yang memuaskan dan rasa ikut berpartisipasi.

Pembangunan manusia seutuhnya adalah pembangunan untuk setiap orang baik laki-laki atau perempuan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, politik dan kebutuhan lainnya melalui program pembangunan terpadu.

Isu strategis pada urusan pendidikan adalah belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Isu strategis pada urusan kebudayaan adalah masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari, belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, dan masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya. Isu strategis pada urusan sosial adalah masih cukup tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

BAB IV
AGENDA RISET DAERAH

4.1 BIDANG FOKUS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya jumlah generasi muda yang tertarik di bidang pertanian 2. Belum tertatanya data pertanian 3. Program dan kegiatan pertanian belum berkelanjutan 4. Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal; 5. Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan pangan masih banyak; 6. Penegakan hukum distribusi pangan masih belum optimal; 7. Kesadaran masyarakat dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian yang berkelanjutan 2. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan; 3. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan inovasi petani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan 4. Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian pencitraan pertanian/<i>Social engineering</i> Pertanian 2. Kajian/Penelitian pertanian spesifik Kabupaten Sleman (mikroorganisme, padi lokal, hortikultura) 3. Penelitian pertanian yang berkelanjutan (pendataan komoditi pertanian, balai benih induk pertanian, revitalisasi stasiun agribisnis) 4. Klasifikasi dan verifikasi data pertanian 5. Pengembangan Penerapan Teknologi pertanian dalam rangka membangun sistem produksi dengan pemberdayaan jejaring kelompok tani 6. Peningkatan Integrasi Pengembangan

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<p>mengonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun;</p> <p>8. Peranan penyuluh pertanian dalam mendampingi petani belum optimal;</p> <p>9. Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal.</p> <p>10. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi;</p> <p>11. Sarana dan prasarana produksi pertanian sering tidak terjangkau oleh petani;</p> <p>12. Serangan hama dan penyakit pertanian masih cukup tinggi;</p> <p>13. Adanya perubahan iklim;</p> <p>14. Harga hasil produksi pertanian tidak stabil;</p>	<p>pertanian.</p> <p>5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani.</p> <p>6. Meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan dan mengoptimalkan sistem pengamanan pangan.</p> <p>7. Meningkatkan fungsi hutan sebagai wilayah penyangga air (<i>catchment area</i>).</p> <p>8. Peningkatan penegakan hukum dan selektifitas penerbitan IPT</p>	<p>tanaman pangan hortikultura dan ternak pada lahan marginal.</p> <p>7. Penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki struktur dan sifat lahan marginal.</p> <p>8. Pengembangan teknik pengelolaan pasca panen dengan menggunakan bahan pendukung yang aman dikonsumsi.</p> <p>9. Kajian performa varietas unggul baru tanaman pangan baru di Kabupaten Sleman.</p> <p>10. Pengembangan teknik budidaya pertanian rendah emisi gas rumah kaca.</p> <p>11. Kajian penurunan kualitas dan kuantitas hasil peretanian terhadap metode panen dan pasca panen</p>

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<p>15. Pengelolaan lahan tegalan belum optimal;</p> <p>16. Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian masih rendah;</p> <p>17. Pengelolaan manajemen agribisnis belum optimal;</p> <p>18. Jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal;</p> <p>19. Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal;</p> <p>20. Tata guna dan tata kelola air belum optimal;</p> <p>21. Akses permodalan bagi petani belum merata.</p> <p>22. Ancaman kerusakan hutan</p>	<p>9. Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil-hasil perikanan.</p>	<p>pertanian.</p> <p>12. Kajian Pemanfaatan tanah sesuai letak geografis dan fungsinya.</p> <p>13. Kajian Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis <i>Hazard Analisis Critical Control Points</i> (HACCP) terhadap proses pengolahan komoditas pangan pertanian.</p> <p>14. Kajian rantai pasokan dan pemenuhan kebutuhan produk pertanian/perikanan segar maupun olahan.</p> <p>15. Pengembangan sumber pangan dan karbohidrat alternatif untuk keanekaragaman pangan berbasis pangan lokal.</p> <p>16. Uji multilokasi varietas tanaman spesifik lokal.</p> <p>17. Kajian budidaya hidroponik untuk</p>

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<p>oleh bencana letusan Gunungapi merapi;</p> <p>23. Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal;</p> <p>24. Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang;</p> <p>25. Luas hutan rakyat semakin berkurang akibat dari kegiatan penambangan;</p> <p>26. Luas lahan kritis masih cukup banyak;</p> <p>27. Tata guna dan tata kelola air belum optimal;</p> <p>28. Fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan belum optimal;</p> <p>29. Produksi ikan konsumsi belum</p>		<p>mengatasi lahan sempit</p> <p>18. Kajian- kajian yang berkaitan dengan siklus pangan.</p> <p>19. Sistem budidaya tanaman terintegrasi dan berkelanjutan.</p> <p>20. Pengembangan penanganan sisten kerawanan pangan.</p> <p>21. Pemberdayaan masyarakat desa rawan pangan.</p> <p>22. Introduksi Varietas Unggul Baru (VUB) (Inpari 13 dan Dodokan) sebagai upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan mendukung stabilitas ketahanan pangan di Kab. Sleman.</p> <p>23. Pengembangan sistem jaringan distribusi pasokan pangan.</p> <p>24. Pengembangan sistem pergudangan</p>

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<p>mampu mencukupi kebutuhan konsumen;</p> <p>30. Akses permodalan petani perikanan masih kurang;</p> <p>31. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem perairan umum masih kurang</p>		<p>yang efisien dan aman bagi lumbung pangan masyarakat.</p> <p>25. Pengembangan Teknologi pengolahan pangan pangan lokal.</p> <p>26. Penerapan pengolahan pangan lokal berbasis <i>Hazard Analysis Critical Control Points</i> (HACCP).</p> <p>27. Pemberdayaan petani melalui diversifikasi produk olahan pangan lokal di Kab. Sleman.</p> <p>28. Diversifikasi olahan tepung berbasis pangan lokal di Kabupaten Sleman.</p> <p>29. Pemetaan potensi pangan lokal dan sumber karbohidrat di kab. Sleman.</p> <p>30. Super <i>adsorbent</i> penyimpan air di bawah permukaan tanah lahan pasiran (porositas tinggi).</p> <p>31. Bahan tambahan makanan (BTM) yang</p>

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
		<p>aman dan ekonomis berbasis sumberdaya lokal.</p> <p>32. Kajian budidaya tanaman bernilai ekonomi pada lahan pertanian terdampak erupsi Gunungapi Merapi mendukung ketahanan pangan.</p> <p>33. Penerapan teknologi untuk produk potensial, produk andalan dan produk unggulan daerah</p>

4.2 BIDANG FOKUS INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana terminal belum memenuhi syarat; 2. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas; 3. Banyak simpang jalan yang belum memenuhi syarat; 4. Pelayanan angkutan umum belum memadai; 5. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal; 6. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) belum merata pada ruas jalan yang padat lalu lintas, masih banyak yang belum dilengkapi kWh meter, dan masih banyak LPJU tanpa ijin/illegal; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga dan meningkatkan prasarana dan sarana perhubungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta 2. Menjaga dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat; 3. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran angkutan umum untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah perdesaan. 2. Pengembangan data base infrastruktur. 3. Pengembangan Sistem Informasi jaringan jalan, desa unggulan/wisata dan jalur evakuasi. 4. Pengembangan pengelolaan infrastruktur dengan pelibatan sektor swasta. 5. Pengembangan manajemen lalu lintas. 6. Pengembangan infrastruktur untuk pejalan kaki dan sepeda. 7. Strategi peningkatan kapasitas simpang untuk kelancaran lalulintas. 8. Kajian penempatan <i>Area Traffic Control</i>

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<p>7. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan masih kurang;</p> <p>8. Peralatan penunjang pelaksanaan urusan perhubungan masih kurang</p> <p>9. Tingkat kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan;</p> <p>10. Kelebihan tonase angkutan barang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan;</p> <p>11. Pelanggaran pemanfaatan ruang milik jalan masih banyak terjadi;</p> <p>12. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan masih kurang;</p>	<p>4. Meningkatkan pemanfaatan IT untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat</p>	<p><i>System (ATCS).</i></p> <p>9. Pengembangan sistem angkutan umum yang dapat meningkatkan interaksi urban-rural.</p> <p>10. Pengembangan sistem pendataan volume lalu lintas pada ruas jalan berbasis mekanik.</p> <p>11. Pengembangan sistem pengaturan jalur lalu lintas dengan berbasis TI.</p> <p>12. Kajian fungsi, kelas, dan status jalan dan upaya penerapannya.</p> <p>13. Pengembangan metode advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan ketertiban dan ketaatan terhadap aturan.</p> <p>14. Rekayasa pembangunan jalan dan jembatan yang efisien dengan mengutamakan bahan dan teknologi</p>

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<p>13. Peralatan penunjang pemeliharaan jalan masih kurang</p> <p>14. Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi;</p> <p>15. Konflik kepentingan pemanfaatan air irigasi masih sering terjadi;</p> <p>16. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi masih kurang;</p> <p>17. Pemanfaatan TI masih belum optimal</p> <p>18. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya TI masih perlu ditingkatkan</p>		<p>lokal.</p> <p>15. Rekayasa material infrastruktur yang rendah karbon berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan.</p> <p>16. Rekayasa material alam guna perlindungan infrastruktur dari abrasi/kerusakan akibat beban berat dan kondisi iklim yang ekstrim (banjir, longsor, gempa dll).</p> <p>17. Pengembangan sarana dan prasarana irigasi mendukung pertanian yang bernilai (tambah) tinggi.</p> <p>18. Formulasi model perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan prasana dan sarana irigasi.</p> <p>19. Pengembangan pola partisipasi publik dalam pemeliharaan fasilitas irigasi.</p>

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
		<ul style="list-style-type: none"> 20. Pengendalian layanan irigasi pendukung pertanian. 21. Pengembangan regulasi terkait dengan masalah pemeliharaan irigasi/umur infrastruktur irigasi. 22. Pengembangan TI untuk mendukung <i>e-Government</i> 23. Pengembangan media pembelajaran berbasis TIK 24. Pengembangan sistem <i>e-Government</i> dan <i>e-Commerce</i> (UKM/IKM) 25. Pengembangan Industri teknologi informasi 26. Implementasi sistem perijinan berbasis teknologi informasi melalui Multi Kanal Akses 27. Pengembangan sistem informasi desa wisata/unggulan

4.3. BIDANG FOKUS LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan semakin terbatas; 2. Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum mencukupi; 3. Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan; 4. Penanganan air limbah rumah tangga /domestik belum dilakukan secara terpadu; 5. Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang; 6. Dampak pemanasan global semakin meningkat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat; 2. Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat; dan 3. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekayasa material jalan raya yang mampu mereduksi panas perkotaan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan. 2. Rekayasa material bangunan yang dapat mereduksi panas perkotaan dan menstabilkan temperatur di ruangan. 3. Pengembangan model permukiman (fisik dan non fisik) yang ramah lingkungan. 4. Model pengembangan kota kompak dan <i>green</i>. 5. Pengembangan model hubungan kota- desa yang berkelanjutan. 6. Pengembangan model desa wisata dan <i>cultural landscape</i> yang khas Sleman 7. Rekayasa material alam untuk

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<p>7. Kualitas lingkungan cenderung mengalami degradasi;</p> <p>8. Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna semakin berkurang;</p> <p>9. Air tanah cenderung mengalami penurunan</p> <p>10. Penambangan bahan galian kurang memperhatikan kelestarian lingkungan</p> <p>11. Masih terdapat beberapa kasus pengambilan air bawah tanah yang melebihi potensi debit</p> <p>12. Tingginya laju pertumbuhan penduduk</p> <p>13. Perubahan pola konsumsi dan produksi yang berdampak pada tata ruang/permukiman</p>	<p>4. Area terdampak langsung erupsi Merapi dan KRB III tidak ada permukiman. KRB II dan KRB I tidak ada pengembangan permukiman.</p> <p>5. Pengembangan biopori dan sumur peresapan air hujan di permukiman.</p> <p>6. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan dan sarana dan prasarana untuk mengurangi resiko bencana.</p> <p>7. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi</p>	<p>perlindungan jalan raya dari abrasi/kerusakan akibat beban berat dan kondisi iklim yang ekstrim (banjir, longsor, gempa dll).</p> <p>8. Rekayasa material alami yang dapat menyerap air hujan ke dalam tanah di daerah lalulintas perkotaan.</p> <p>9. Pengembangan super <i>adsorbent</i> dari bahan dasar yang ramah lingkungan.</p> <p>10. Penelitian untuk mengurangi bau limbah ternak (sapi, kambing, kerbau, ayam).</p> <p>11. Pengembangan ekstrak nanoclay untuk filter air.</p> <p>12. Pengembangan kandungan silika kulit padi untuk bahan partisi.</p> <p>13. Pengembangan sumberdaya hayati.</p> <p>14. Pengembangan sistem data base</p>

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<p>14. Kegiatan penanggulangan bencana masih pada tahapan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi sehingga belum menjadikan kegiatan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas;</p> <p>15. Kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan bencana masih kurang</p> <p>16. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana masih kurang;</p> <p>17. Proses identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta penetapan system peringatan dini masih kurang;</p>	<p>bencana</p> <p>8. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penanggulangan bencana alam melalui peranserta masyarakat</p>	<p>penanggulangan bencana Gunungapi Merapi berbasis data spasial.</p> <p>15. Optimalisasi peran komunitas masyarakat peduli bencana dalam penanggulangan bencana</p> <p>16. Kajian potensi ancaman bencana lahar dingin di sungai-sungai yang berhulu di Gunungapi Merapi pasca erupsi tahun 2010.</p> <p>17. Pengelolaan sistem evakuasi dan pengungsian masyarakat terdampak letusan Gunungapi Merapi dan tanah longsor</p> <p>18. Pengembangan sistem rumah yang lebih aman terhadap awan panas Gunungapi Merapi.</p> <p>19. Model pengembangan desa tangguh (<i>resilient community</i>)</p>

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<p>18. Pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana belum dimanfaatkan.</p> <p>19. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana penganggulangan bencana masih kurang;</p> <p>20. Peralatan penunjang penanggulangan bencana masih kurang</p>		<p>20. Pengembangan model rumah lindung sementara (rulinda).</p> <p>21. Survey terhadap tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.</p> <p>22. Pengembangan model sosialisasi penanggulangan bencana;</p> <p>23. Pengembangan sistem peringatan dini untuk pengurangan resiko bencana di kawasan rawan bencana</p>

4.4 BIDANG FOKUS KESEHATAN DAN OBAT

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas belum optimal. 2. Banyaknya pedagang makanan dan minuman di pasar, lingkungan sekolah dan masyarakat yang kurang memenuhi standar kesehatan 3. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih kurang 4. Banyaknya peredaran obat dan makanan kesehatan yang belum teruji secara klinis dan berstandar yang bersumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas dan Rumah Sakit. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan 4. Meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak sekolah 5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyakit yang bersumber pada makanan yang tidak sehat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan petugas, ketersediaan sarana dan prasarana dan fasilitas lain di Puskesmas dan Rumah Sakit. 2. Pola pembinaan dan pengawasan pedagang makanan dan minuman di pasar, lingkungan sekolah dan masyarakat yang bersih dan memenuhi standar kesehatan. 3. Pola pembinaan, pengendalian, dan pengawasan produk-produk herbal yang beredar di masyarakat 4. pemanfaatan bahan-bahan herbal berbasis tanaman lokal untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit.

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<p>dari produk lokal dan herbal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk dapat berperilaku hidup bersih, sehat dan nyaman 7. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman 8. Meningkatkan kualitas obat dan makanan yang berstandar dan herbal yang beredar di masyarakat 9. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 5. penelitian penggunaan dan efek samping obat tradisional. 6. Penelitian penggunaan obat secara rasional dan djamoe tersaintifikasi 7. Penelitian pencemaran dan sosial budaya terhadap kesehatan.

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
	<p>peredaran obat dan makanan kesehatan di masyarakat</p> <p>10. Meningkatkan daya saing dan produksi obat dan makanan kesehatan herbal serta ekonomi masyarakat.</p>	

4.5. BIDANG FOKUS KEAMANAN DAN KETERTIBAN

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat; 2. Penegakan Perda belum optimal; 3. Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan masih belum optimal; 4. Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban belum memadai; 5. Koordinasi antar pemangku kepentingan belum optimal 6. Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang 7. Jiwa nasionalisme dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban; 2. Perlu peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar data dan fakta potensi konflik dapat lebih optimal; termanfaatkan 3. Meningkatkan etika dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila; 4. Meningkatkan semangat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. survey tentang kesadaran masyarakat terhadap tingkat keamanan dan ketertiban 2. penelitian untuk mencari format ideal dalam rangka cegah dini dan deteksi dini 3. Rancang-bangun dan rekayasa pengendus narkoba 4. Rancang-bangun dan rekayasa keamanan dalam penggunaan teknologi informasi 5. Pengembangan sistem partisipasi masyarakat untuk menekan angka kriminalitas 6. Peningkatan kesempatan lapangan kerja dan menumbuhkan inkubator untuk menekan angka kriminalitas.

<p>patriotisme cenderung menurun;</p> <p>8. Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang</p> <p>9. Jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun;</p>	<p>nasionalisme bagi aparat dan masyarakat;</p> <p>5. Meningkatkan etika dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila;</p> <p>6. Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat;</p>	<p>7. Upaya peningkatan kehidupan berbangsa melalui pendidikan karakter</p> <p>8. Upaya internalisasi kebangsaan melalui proses pelatihan, pendidikan dan kebudayaan</p> <p>9. Rekayasa sosial mencegah konflik SARA</p> <p>10. Rancang-bangun sosial perluasan partisipasi masyarakat dalam sishankamrata</p> <p>11. Penelitian demokrasi sosial politik</p>
---	--	---

4.6. BIDANG FOKUS SOSIAL KEMASYARAKATAN

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<ol style="list-style-type: none"> 1. Munculnya kecenderungan perilaku dalam masyarakat yang dapat mengarah kepada eksklusivisme dan praktek pembatasan terhadap kebebasan berfikir, kebebasan beragama, dan kebebasan mengemukakan pendapat di tempat umum 2. Warga masyarakat yang buta huruf masih sebanyak 7,39%; 3. Anak usia 3-6 tahun yang belum terlayani lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak sebanyak 33,60%; 4. Anak putus sekolah SD/MI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kehidupan sosial yang damai, jauh dari kekerasan 2. Terlembaganya nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat 3. Mempertahankan Wajar 9 tahun dan melaksanakan Wajar 12 tahun; 4. Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis dan budi pekerti; 5. Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi fenomena anti-pluralisme dan anti-multikulturalisme di dalam masyarakat 2. Identifikasi terhadap kekuatan masyarakat dalam mengelola perbedaan. 3. Penelitian tentang pengaruh radikalisme terhadap pelembagaan nilai-nilai pembangunan dan terjaganya partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan di Kabupaten Sleman 4. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang akulturasi masyarakat yang pluralisme 5. Survey kapasitas sarana prasarana terhadap kondisi masyarakat yang masih buta huruf

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<p>sebesar 0,04%, SMP/MTs sebesar 0,08% dan SMA/SMK/MA sebesar 0,02%;</p> <p>5. Meningkatnya kenakalan dan kriminalitas pelajar</p> <p>6. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang;</p> <p>7. Etika dan penguasaan bahasa Jawa di lingkungan peserta didik masih rendah</p> <p>8. Pendidik yang baru memenuhi standar kualifikasi DIV/S1 jenjang TK 32,31%, SD 48,99%, SMP 72,99%, SMA/SMK 89,39%;</p> <p>9. Sarana prasarana minimal pada jenjang TK dan SD</p>	<p>6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan;</p> <p>8. Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan</p> <p>9. Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu</p> <p>10. Meningkatkan efektifitas program-program penanggulangan kemiskinan dan penyakit sosial masyarakat.</p>	<p>6. Penelitian dan Pengembangan model pembelajaran dan pendidikan berkarakter</p> <p>7. Pengembangan kebijakan kurikulum berbasis budaya lokal</p> <p>8. Peningkatan kualitas kemampuan masyarakat menggunakan bahasa lokal/Jawa</p> <p>9. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan seni dan budaya lokal</p> <p>10. Identifikasi penerapan seni dan budaya lokal dalam kegiatan sehari-hari.</p> <p>11. Mapping wisata sejarah</p> <p>12. Pengembangan Standar kompetensi dan kurikulum pendidikan profesi guru</p> <p>13. Pengembangan standar biaya dan</p>

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
<p>terutama perpustakaan dan laboratorium serta mebelair masih kurang</p> <p>10. Kompetensi lulusan siswa SMA belum sesuai dengan pasar kerja.</p> <p>11. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sleman</p> <p>12. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Sleman</p> <p>13. Banyaknya Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Anak jalanan dan Gelandangan, pengemis.</p>		<p>fasilitas pendidikan</p> <p>14. Pengkajian kurikulum di SMK</p> <p>15. Sikap masyarakat pengguna jalan terhadap kehadiran pengamen, anak jalanan (punk), waria.</p> <p>16. Aspek genetik aktivitas para pengamen, punk, waria</p> <p>17. Pengurangan kemiskinan (metode/mechanisme) dan masalah sosial lainnya</p> <p>18. Penelitian pengurangan angka pengangguran</p> <p>19. Penelitian Indikator Desa Mandiri</p> <p>20. Identifikasi dan pemetaan karakter sosial</p> <p>21. Pengembangan Budaya kelompok masyarakat</p> <p>22. Pengembangan budaya kreatif</p>

PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	TOPIK
		23. Penelitian demokrasi ekonomi 24. Kajian potensi PAD 25. Dampak pembangunan terhadap kesejahteraan

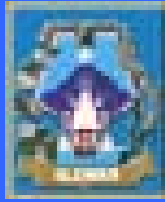
BUPATI SLEMAN,

Cap / ttd

SRI PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Hery Dwikuryanto, S.H., M.Hum
 NIP. 19640710 199303 1 01



KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR: 400/Kep.KDH/A/2012

TENTANG

AGENDA RISET DAERAH TAHUN 2011-2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

